

Analisis Kebijakan Penggunaan E-Peken sebagai Optimalisasi Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Kedungdoro Kota Surabaya

Rokhmatun Nur Wakhidah¹⁾, Widyawati²⁾, Sapto Pramono³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: rokmatunnurw@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan publik lahir sebagai respon terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat diukur dari dampak yang dihasilkan. Jika kebijakan mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, maka dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan. Pemerintah Kota Surabaya telah mengembangkan sebuah aplikasi sebagai bentuk inovasi dalam mendorong transaksi digitalisasi UMKM dengan melibatkan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan, serta Dinas Statistik Kota Surabaya. Pada tanggal 31 Oktober 2021, Pemerintah Kota Surabaya secara resmi meluncurkan aplikasi E-Peken (Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo). Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan William N. Dunn (2000) meliputi empiris, normatif, dan evaluatif. Analisis data dilakukan dengan metode Miles & Huberman yang menyangkut reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kebijakan E-Peken berjalan dengan baik untuk UMKM, namun ada beberapa aspek dalam indikator analisis yang perlu diperbaiki. Faktor penghambat diantaranya: 1) Keterbatasan dalam kesiapan digital, seperti kurangnya pemahaman tentang teknologi dalam penggunaannya bisa menjadi kendala; 2) Tingginya tingkat persaingan di pasar, dapat menyulitkan beberapa UMKM untuk memperoleh eksposur yang memadai dan menarik pelanggan; 3) Keterbatasan kerjasama dengan pihak terkait, dapat menghambat pelaku UMKM dalam menjalankan operasional mereka secara menyeluruh melalui platform E-Peken; serta 4) Resistensi terhadap perubahan, terutama apabila mereka telah mengelola bisnis dengan cara yang sama dalam jangka waktu yang lama.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, E-Peken, Pemberdayaan UMKM

Abstract

Public policy was born as a response to the needs and problems faced by society. The success of policy implementation can be measured by the resulting impact. If the policy achieves the desired goals and objectives, it can be considered an indicator of success. The Surabaya City Government has developed an application as a form of innovation in encouraging MSME digitalization transactions by involving cooperation between the Surabaya City Government, the Office of Micro, Small and Medium Enterprises Cooperatives and Trade, and the Surabaya City Statistics Office. On October 31, 2021, the Surabaya City Government officially launched the E-Peken (Economic Empowerment and Economic Resilience Nang Suroboyo) application. This research uses William N. Dunn's (2000) policy analysis theory including empirical, normative, and evaluative. Data analysis was conducted using the Miles & Huberman method which involves data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. This research used a qualitative approach, namely interviews, documentation, and observation. The results show that the E-Peken policy analysis is running well for MSMEs, but there are several aspects in the analysis indicators that need to be improved. The inhibiting factors include: 1) Limitations in digital readiness, such as a lack of understanding of the technology in its use can be an obstacle; 2) The high level of competition in the market, which can make it difficult for some MSMEs to gain sufficient exposure and attract customers; 3) Limited cooperation with related parties, which can hinder MSME players in running their operations thoroughly through the E-Peken platform; and 4) Resistance to change, especially if they have been managing their business in the same way for a long period of time.

Keywords: Policy Analysis, E-Peken, UMKM Empowerment

A. LATAR BELAKANG

Kinerja ekonomi dalam negara pada periode tertentu dapat dilihat pada indikator pendapatan nasionalnya. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu negara. Tujuan perhitungan pendapatan nasional yaitu untuk menggambarkan detail tingkat ekonomi yang telah tercapai dan nilai total output yang dihasilkan, dengan tujuan meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat (Hamza & Agustien, 2019). Dalam pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan perubahan positif dalam ukuran-ukuran ekonomi seperti produksi, pendapatan, lapangan kerja, dan nilai barang serta jasa yang dihasilkan dalam suatu negara (Kambono & Marpaung, 2020).

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha kecil yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kriteria untuk klasifikasi UMKM dapat mencakup faktor seperti jumlah aset, omset penjualan, dan jumlah karyawan (Asmaira Munthe & Siregar, 2023). Pentingnya menentukan jenis UMKM ini berkaitan dengan beberapa hal, termasuk proses pengurusan surat izin usaha dan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM.

Dengan mengetahui kategori UMKM yang tepat, pemerintah dapat memberikan fasilitas atau bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas finansial dari masing-masing jenis UMKM. Hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung dan mengembangkan UMKM di berbagai sektor ekonomi. Dengan memahami kriteria yang ada, pemilik UMKM juga dapat mengelola usaha mereka dengan lebih baik sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pengembangan fasilitas pendukung dan kerjasama antar-kota adalah langkah yang sangat bijak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Surabaya di era globalisasi. Dengan era

globalisasi yang tanpa batas, terdapat potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi, terutama bagi Kota Surabaya yang memiliki posisi strategis.

Penting bagi Surabaya untuk terus mengelola pertumbuhan dengan bijak, memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas pendukung dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Selain itu, kerjasama dengan kota lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dapat membuka peluang baru untuk investasi dan pertukaran ekonomi yang saling menguntungkan. Dengan strategi yang tepat, Surabaya dapat memanfaatkan momentum ini untuk menjadi pusat ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan di era globalisasi.

Kelurahan Kedungdoro di Kota Surabaya menjadi pusat aktivitas ekonomi dengan keberagaman usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beragam seperti toko spare part mobil, toko kue, warung, toko kelontong, dan berbagai usaha lainnya. Hal ini menjadikan Kedungdoro memiliki potensi yang kuat dan berperan penting dalam perekonomian lokal dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Surabaya.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Kelurahan Kedungdoro mengalami penurunan penghasilan. Keterbatasan dalam melakukan pemasaran produk, kurangnya pemahaman tentang teknologi digital, dan penurunan daya beli masyarakat. Ketidakpastian akan berakhirnya pandemi membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran keuangannya. Hal ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, terutama pada produksi, distribusi, dan penjualan barang serta jasa. Selain itu, pelaku UMKM mayoritas berusia 40-70 tahun juga menghadapi kendala dalam memanfaatkan teknologi digital, meskipun mereka memiliki akses ke alat komunikasi yang memadai (Illahi, dkk 2022). Hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pemasaran dan operasional bisnis mereka.

Dengan memahami tantangan ini, pemerintah dan pihak terkait dapat merancang strategi dukungan yang lebih gebrakan dan solutif bagi UMKM di Kelurahan Kedungdoro. Hal ini dapat mencakup program pelatihan digital, bantuan finansial, promosi produk lokal, dan langkah-langkah lain yang dapat membantu UMKM untuk pulih dan berkembang meskipun telah selesainya pandemi.

Dalam era digital seperti sekarang, memanfaatkan teknologi internet adalah suatu keharusan bagi bisnis untuk dapat bersaing dan tumbuh. Jangkauan internet memungkinkan bisnis untuk menjangkau audiens yang sangat luas, bahkan secara global. Dengan platform online, bisnis dapat memasarkan produk atau layanan mereka kepada orang-orang di berbagai belahan dunia.

Melalui media sosial dan situs website, bisnis dapat berinteraksi secara langsung dengan pelanggan mereka. Hal tersebut memungkinkan untuk mendapatkan umpan balik langsung, memahami kebutuhan pelanggan, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, penting untuk dapat beradaptasi dengan cepat. Internet memungkinkan bisnis untuk tetap terkini dengan tren teknologi terbaru, dan berpotensi mempertahankan atau bahkan meningkatkan daya saing mereka.

Dengan memanfaatkan potensi pemasaran digital ini, pelaku usaha mikro dapat memperluas jangkauan bisnis mereka, meningkatkan kehadiran online, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan mereka. Ini adalah langkah penting dalam memajukan dan mengembangkan usaha mereka dalam era digital saat ini.

Pemanfaatan *e-commerce* sebagai media pemasaran melalui internet telah membawa dampak besar dalam dunia bisnis, terutama bagi pelaku usaha kecil dan rumahan. Dengan adanya platform *e-commerce*, proses pemesanan, pembayaran, dan pengiriman dapat diotomatisasi. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko kesalahan manusia.

Dalam dunia *e-commerce*, inovasi dan perubahan dapat dilakukan dengan cepat. Ini memungkinkan pelaku usaha untuk merespon tren pasar atau kebutuhan konsumen dengan lebih fleksibel. *E-commerce* memungkinkan pelaku usaha rumahan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, yang menguatkan perekonomian lokal. Namun perlu diingat kembali bahwa penggunaan *e-commerce* juga membutuhkan penanganan dengan hati-hati terkait keamanan data, perlindungan konsumen, dan strategi pemasaran yang efektif.

Perkembangan UMKM pada bidang *e-commerce* telah menjadi salah satu tren yang signifikan dalam ekonomi global. Berkembangnya teknologi dan akses yang lebih mudah ke internet telah membuka pintu bagi UMKM untuk memanfaatkan platform *e-commerce*. Mereka dapat menjual produk atau jasa secara online dengan mencapai pasar yang lebih luas, bahkan tingkat internasional. Dengan menggunakan teknologi, UMKM dapat lebih inovatif dalam menciptakan produk atau layanan baru. Mereka dapat memanfaatkan analitik data untuk memahami kebutuhan pasar dan meningkatkan produk mereka. Untuk memaksimalkan manfaat pada *e-commerce*, penting bagi UMKM untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai. Pelatihan dan program pendidikan khusus dapat membantu mereka memahami dan memanfaatkan teknologi dengan lebih efektif, pentingnya dukungan dan kebijakan program dari pemerintah serta dukungan dari sektor swasta dapat membantu mempercepat adopsi teknologi di kalangan UMKM.

UMKM di suatu daerah memiliki potensi besar untuk menjadi platform yang baik dalam mengenalkan produk-produk lokal kepada masyarakat lebih luas. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait perlu mendukung kegiatan UMKM dan memberikan dukungan dalam hal promosi, pelatihan, akses pasar, serta fasilitas yang diperlukan untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM dan memungkinkan produk-produk lokal untuk dikenal oleh masyarakat lebih luas.

Dengan memberdayakan UMKM, Pemerintah Kota Surabaya membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas. Hal ini akan membawa manfaat positif bagi perekonomian Surabaya dan memperkaya keragaman jenis UMKM di setiap Kecamatan yang memiliki ciri khasnya sendiri, akan ada lebih banyak variasi produk dan layanan yang tersedia bagi masyarakat Surabaya. Hal ini akan memberikan banyak kesempatan bagi pelaku usaha untuk memasarkan dan memperluas jangkauan mereka. Dengan terus mendorong inovasi dan kreativitas di antara UMKM, Surabaya dapat tetap menjadi pusat ekonomi yang dinamis dan beragam, memberikan manfaat jangka panjang bagi warga dan perekonomian kota.

Dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diimplementasikan melalui pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa 40% dari APBD harus diperuntukkan bagi perkembangan Koperasi dan UMKM. Eri Cahyadi, yang menjabat sebagai Walikota Surabaya, dengan tegas menyatakan komitmennya terhadap penggunaan 40% dari APBD untuk mendukung UMKM sebagai pendorong utama ekonomi masyarakat (Isna Masmira Dwijayanti, 2023).

Pemerintah Kota Surabaya telah mengembangkan sebuah aplikasi sebagai bentuk inovasi dalam mendorong transaksi digitalisasi UMKM dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah Kota Surabaya, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan, dan Dinas Statistik Kota Surabaya dengan meluncurkan suatu sistem elektronik yang baru berupa platform *e-commerce*. Pada tanggal 31 Oktober 2021, Pemerintah Kota Surabaya secara resmi meluncurkan aplikasi PEKEN Surabaya, yang merupakan singkatan dari Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo. Aplikasi ini dapat diakses melalui situs web <https://peken.surabaya.go.id>. Dengan adanya E-

Peken ini, diharapkan UMKM di Kota Surabaya mampu dengan lebih efisien untuk berinteraksi dengan pelanggan yang sudah ada dan calon pelanggan potensial, agar meningkatkan interaksi ekonomi yang lebih luas (Brianita et al., 2023).



Gambar 1.1. Halaman Depan E-Peken Surabaya

Surabaya: <https://peken.surabaya.go.id/>

E-Peken memberikan akses kepada pegawai pemerintah dan masyarakat untuk memesan barang dari toko kelontong yang tersebar pada setiap kecamatan di Kota Surabaya. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan pemesanan dengan lebih mudah dan efisien.

Tujuan Pemerintah Kota Surabaya merilis website E-Peken yaitu untuk memulihkan ekonomi di Kota Surabaya setelah terdampak pandemi Covid-19. Melalui platform ini, Pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM dan pedagang lokal agar dapat terus beroperasi dan memasarkan produk mereka, meskipun dalam situasi pandemi.

Website E-Peken Surabaya menjadi sarana yang memungkinkan pelaku usaha untuk tetap terhubung dengan pelanggan, bahkan di tengah keterbatasan fisik selama pandemi. Selain itu, hal ini juga memperluas aksesibilitas terhadap produk UMKM, sehingga dapat mencapai lebih banyak pelanggan potensial.

Dengan merilis platform ini, menjadikan langkah yang baik dalam mendukung perekonomian lokal dan memudahkan akses masyarakat terhadap barang-barang yang mereka butuhkan. Adanya teknologi digital dan platform online, E-Peken dapat membantu mempercepat transaksi dan memajukan sektor UMKM di Surabaya.

Kontribusi langsung dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah contoh yang sangat positif dari dukungan komunitas dan pemerintah lokal. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mendukung pertumbuhan UMKM secara nyata. Secara keseluruhan inisiatif ini memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif pada perekonomian lokal dan membantu UMKM untuk berkembang serta menunjukkan kesadaran dan komitmen dari pemerintah dan komunitas lokal untuk mendukung sektor UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Apabila dibandingkan dengan *marketplace* lain di Indonesia, E-Peken Surabaya lebih mendominasi sebagai platform *e-commerce* yang paling populer. Keberhasilan ini disebabkan karena E-Peken dapat meraih posisi yang sangat diingat masyarakat, terutama kalangan perempuan. Simbol E-Peken Surabaya yang berupa tas tangan dengan huruf “S” di tengah dan berwarna oranye yang mencolok, menjadikan ciri khas yang kuat dan mudah diingat.

Sebagian dari pelanggan yang setia merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pemerintah Kota Surabaya yang mewajibkan para ASN membeli kebutuhan pokok mereka melalui aplikasi E-peken. Selain itu, E-Peken telah dibuka untuk masyarakat umum agar memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk berbelanja melalui platform *e-commerce* ini (Akbari & Prathama, 2023).

Dalam langkah progresif untuk mendukung para pelaku UMKM agar dapat beradaptasi dengan teknologi dan digitalisasi merupakan kunci untuk memperluas jangkauan. Dengan menyediakan sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan gratis, Pemerintah Kota Surabaya membuktikan komitmennya dalam membantu para pelaku UMKM mengatasi hambatan-hambatan terkait digitalisasi. Program ini memberikan mereka kesempatan untuk memperluas usaha mereka, bahkan jika mereka masih dalam tahap adaptasi terhadap teknologi modern. Namun masih ditemukan beberapa permasalahan terkait penggiat UMKM dalam mengakses E-Peken. Oleh karena itu, perkembangan E-Peken masih sangat perlu

ditingkatkan demi kenyamanan penggiat usaha dan para konsumen.

Tindakan untuk mengencarkan penggunaan website E-Peken melalui sosialisasi dan promosi di media sosial adalah langkah strategis yang sangat baik. Dengan memanfaatkan platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lainnya, Pemerintah Kota Surabaya dapat mencapai audiens yang lebih luas dan membangun kesadaran tentang keberadaan dan manfaat dari E-Peken.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik lahir sebagai respon terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. *Stakeholder* dalam pembuatan kebijakan publik adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan kebijakan tersebut. Pemerintah adalah salah satu *stakeholder* utama dalam pembuatan kebijakan publik. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat diukur dari dampak yang dihasilkan. Jika kebijakan mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan dampak positif, maka ini dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan.

Keberhasilan kebijakan dapat diukur dari sejauh mana masyarakat dapat diarahkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dengan merancang program dengan baik dan menyusun struktur pelaksanaan yang efisien. Pelaksanaan kebijakan melibatkan sejumlah kegiatan dan program yang dirancang untuk menerapkan keputusan kebijakan. Ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor wisata (Desrinelti et al., 2021).

2. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan suatu proses berpikir dengan bersifat kognitif, kehadiran analisis kebijakan muncul sebagai respon terhadap banyaknya kebijakan yang dinilai tidak memuaskan. Banyak kebijakan

dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan masalah, bahkan kadang-kadang menciptakan masalah baru. Analisis kebijakan menjadi sangat penting untuk menentukan kebijakan mana yang sesuai dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan tersebut dirancang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Analisis dapat dilakukan pada tahap awal pembuatan kebijakan atau pada akhir implementasi kebijakan (Guntur, 2019).

Menurut (Safitri et al., 2021) Badjuri dan Yuwono menyajikan lima poin utama yang menjelaskan pentingnya melakukan analisis kebijakan, yaitu:

- a) Analisis kebijakan diterapkan menggunakan metode ilmiah yang bersifat objektif, rasional, dan saintifik. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam melaksanakan analisis kebijakan, pembuatan kebijakan dilakukan secara ilmiah, dengan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
- b) Analisis kebijakan yang dilakukan dengan serius dan komprehensif akan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan target, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*public welfare*).
- c) Analisis kebijakan melibatkan berbagai dimensi, saling terkait, dan memiliki korelasi antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, analisis ini sangat penting untuk dilakukan agar menghasilkan guna mencapai dampak yang menyeluruh.
- d) Analisis kebijakan dapat memberikan pedoman menyeluruh dalam pelaksanaan dan penilaian kebijakan. Sebagai substansi dan strategis, analisis kebijakan dapat menjadi landasan untuk kebijakan di masa depan.
- e) Analisis kebijakan juga menciptakan peluang besar bagi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan (partisipasi publik). Dalam proses analisis kebijakan, masyarakat dapat menjadi subjek yang

memberikan kontribusi untuk menyuarakan pendapat mereka.

3. Model Analisis Kebijakan William N Dunn

Menurut (Fatmariyanti & Fauzi, 2023), William Dunn mengemukakan bahwa analisis kebijakan didefinisikan sebagai cabang ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode penelitian dan argumen.

Untuk menghasilkan serta menyampaikan informasi yang relevan terkait kebijakan. Hal ini bertujuan untuk digunakan dalam ranah politik dengan maksud memecahkan permasalahan-permasalahan kebijakan. William Dunn dalam bukunya yang berjudul “Analisis Kebijakan Publik”, menjelaskan analisis kebijakan sebagai suatu aktivitas intelektual yang terjadi dalam konteks proses politik. Dengan merangkum gagasan para ahli, analisis kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menciptakan pengetahuan mengenai suatu hal dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

William Dunn mengidentifikasi tiga bentuk utama analisis kebijakan, yaitu:

- a) Analisis Kebijakan Prospektif
Analisis kebijakan prospektif adalah suatu proses produksi dan transformasi informasi sebelum pelaksanaan dan implementasi aksi kebijakan. Pada tahap ini, analisis kebijakan berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan informasi guna merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan secara perbandingan. Hasilnya dapat berupa bentuk bahasa kuantitatif dan kualitatif, yang menjadi dasar atau panduan dalam pengambilan keputusan kebijakan.
- b) Analisis Kebijakan Retrospektif
Analisis kebijakan retrospektif melibatkan pembuatan dan transformasi informasi setelah tindakan kebijakan dilakukan. Ada tiga jenis analisis berdasarkan kegiatan yang diterapkan

oleh kelompok analisis ini, yaitu analisis yang fokus pada disiplin, analisis yang fokus pada masalah, dan analisis yang fokus pada aplikasi. Masing-masing dari ketiga tipe analisis retrospektif ini tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan.

c) Analisis Kebijakan Terintegritas

Analisis kebijakan yang terintegrasi adalah suatu bentuk analisis yang menggabungkan pendekatan para praktisi yang memperhatikan penciptaan dan transformasi sebelum dan setelah tindakan kebijakan diambil. Dalam analisis kebijakan yang terintegrasi, para analis tidak hanya diharuskan untuk menghubungkan tahap penyelidikan retrospektif dan prospektif, tetapi juga diminta untuk secara terus-menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi pada setiap langkahnya.

4. *E-Government*

E-government merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan kepada warga, urusan bisnis, dan aspek lain yang terkait dengan pemerintahan. Salah satu contoh Pemerintah Daerah yang dikenal dengan inovasi *e-government* Pemerintah Kota Surabaya, pengembangan *e-government* di Surabaya didukung oleh Peraturan Walikota Surabaya No. 5 Tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kebutuhan akan sistem yang terintegrasi oleh pemerintah pusat dan daerah didorong oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Selain itu, pengembangan *e-government* didukung oleh regulasi terkait seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Penerapan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai *e-government* merupakan suatu inovasi dalam reformasi birokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel berbasis elektronik. Perubahan ini menciptakan peluang besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dengan memungkinkan mereka menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan pemerintahan. selain itu, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi juga membuka peluang untuk mengakses, mengelola, dan memanfaatkan informasi dalam jumlah besar secara cepat dan akurat.

Menurut (Rozikin dkk, 2020) dari apa yang terjadi di lapangan, terlihat bahwa implementasi *e-government* di Indonesia telah meningkat secara kuantitatif, namun secara kualitatif masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah dan hasil yang diperoleh dari *e-government* itu sendiri. Salah satu penyebab kegagalan dalam pelaksanaan *e-government* adalah kurangnya adaptasi dalam perubahan manajemen, di mana Pemerintah cenderung tidak mempertimbangkan bahwa setiap objek *e-government* baik pemerintah pusat maupun daerah, memiliki kondisi yang unik. Akibatnya, mereka hanya menerapkan model *e-government* yang bersifat umum untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan *e-government* hingga tingkat daerah. Pemerintah perlu mengakomodasi kekhasan tiap-tiap daerah dengan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam penerapan *e-government*.

5. Aplikasi Mobile E-Peken

E-Peken merupakan aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menghubungkan toko kelontong dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan konsumen di

Kota Surabaya. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada tanggal 31 Oktober 2021, keberadaan aplikasi mobile ini bertujuan untuk mempermudah UMKM, Sentra Wisata Kuliner (SWK) dan toko kelontong dalam memperluas pemasaran mereka, sekaligus mendukung pengembangan sektor ekonomi kerakyatan.

Dalam hal transaksi, E-Peken dirancang untuk memberikan keamanan kepada penjual dan pembeli. Aplikasi ini menyediakan pembayaran melalui QR code untuk memudahkan pembayaran melalui berbagai bank. Pada setiap transaksinya, nantinya dikirimkan report laporan yang dipergunakan sebagai bahan evaluasi oleh pemilik UMKM. Dengan dibekali fitur tersebut, akan mempermudah Pemkot Surabaya untuk memantau UMKM yang masih membutuhkan pendampingan. Dalam mendukung persaingan harga, Pemerintah Kota Surabaya menyediakan fasilitas penyediaan barang bagi penggiat toko kelontong dan UMKM Kota Surabaya. Fitur UMKM yang ada di E-Peken mencakup beberapa kategori berupa UMKM olahan rumah tangga, makanan dari Sentra Wisata Kuliner (SWK), serta bahan-bahan pokok dari toko kelontong. E-Peken juga memiliki macam produk seperti *fashion*, kuliner, dan *craft* (Nauval et al., 2023).

Dalam upaya mewujudkan pemulihan ekonomi, E-Peken juga cukup berhasil. Dilansir dalam laman artikel liputan6 mengenai capaian dari transaksi jual beli online melalui E-Peken Surabaya pada awal tahun 2022 telah mencapai Rp 3.34 miliar (Agustina & Suwardianto, 2023). Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Rini Indriyani menyatakan bahwa SFW 2021 dalam platform peken memiliki tujuan untuk percepatan pemulihan ekonomi di Kota Surabaya.

6. UMKM Kelurahan Kedungdoro

UMKM dikenal sebagai usaha yang mandiri dan dapat ditemukan di berbagai sektor ekonomi, UMKM diakui sebagai roda

penggerak perekonomian. Kemampuan UMKM dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wenny et al., J2022).

Keragaman UMKM di Kelurahan Kedungdoro, terutama dalam sektor produksi *craft* mencerminkan fokus pada produksi kerajinan tangan, yang mungkin menjadi kebanggaan dan identitas khusus bagi masyarakat setempat. Aktivitas aktif berjualan dari para pedagang E-Peken di Kelurahan Kedungdoro merupakan keterlibatan dan antusiasme mereka dalam memanfaatkan platform digital seperti E-Peken untuk menjual produk mereka. Berjualan secara online tidak hanya membuka peluang lebih luas dalam mencapai pelanggan, tetapi juga memungkinkan para pedagang untuk beradaptasi dengan perubahan pola konsumen yang semakin cenderung ke arah belanja online.

Dengan tetap aktif dalam berjualan, para pedagang dapat membangun dan memperluas basis pelanggan mereka. Penting juga untuk terus menerapkan praktik-praktik bisnis yang baik, seperti memberikan pelayanan pelanggan yang baik, memastikan kualitas produk, dan menjaga konsistensi dalam penawaran.

Keberadaan UMKM seperti ini tidak hanya menciptakan keberagaman dalam penawaran produk di tingkat lokal tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan pelestarian tradisi lokal. Pemerintah daerah, melalui program-program seperti E-Peken dapat terus mendukung dan mempromosikan UMKM semacam ini, membantu para UMKM untuk berkembang dan bersaing di era digital.

Demikian pula, dukungan dari pemerintah daerah dan pihak-pihak kepentingan lainnya dapat terus memberikan dukungan, pelatihan, atau sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk dipastikan bahwa para pedagang dapat memaksimalkan potensi platform digital tersebut dan terus

tumbuh dalam ekosistem perdagangan online.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang memfokuskan pada proses yang menyelidiki sebuah fenomena sosial. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci utama, peneliti harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas agar untuk mengumpulkan informasi, bertanya, dan menganalisis objek secara mendalam. Penelitian kualitatif dipilih ketika masalah penelitian masih belum terdefinisi dengan jelas, dan juga digunakan untuk mengembangkan teori, serta memastikan keakuratan data.

Selain itu metode kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, perilaku yang diamati, serta lingkungan sosial yang terdiri dari pelaku, kejadian, tempat dan juga waktu. Sehingga penelitian kualitatif mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan dari situasi yang alami.

Metode penelitian kualitatif menekankan aspek pemahaman mendalam terhadap suatu masalah daripada melakukan generalisasi. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif milik Miles dan Huberman yang melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan analisis E-Peken sebagai optimalisasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Kedungdoro Kota Surabaya.

2. Fokus Penelitian

Pentingnya fokus penelitian dalam penelitian kualitatif sangat terkait dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Dalam konteks ini, fokus penelitian dapat mengalami perkembangan atau perubahan seiring dengan evolusi masalah penelitian di lapangan. Dengan memiliki fokus yang jelas, peneliti dapat memusatkan perhatian pada satu area, hal tersebut membuat temuan atau kontribusi yang lebih signifikan dalam bidang studi tersebut.

Dalam penelitian ini berfokus pada analisis retrospektif yang berarti bahwa analisis dilakukan setelah pelaksanaan kebijakan. Pendekatan analisis kebijakan ini bersumber dari berbagai ilmu dengan tujuan menyediakan informasi yang bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Untuk menjawab analisis kebijakan, dapat diterapkan salah satu atau gabungan dari ketiga pendekatan analisis, yaitu empiris, evaluatif, dan normatif.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti untuk mendapatkan data, melakukan pengamatan, mewawancarai narasumber, dan mengumpulkan data adalah di Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan, serta di Kelurahan Kedungdoro, Kota Surabaya. Tempat-tempat ini berfungsi sebagai sumber informasi penting dan merupakan bagian penting dari kelengkapan penelitian yang berkaitan dengan kebijakan yang sedang dipelajari.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Analisis Penggunaan E-Peken Pada Pemberdayaan UMKM

a) Empiris

Empiris adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris atau data yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Pendekatan ini berusaha

menjawab permasalahan dengan merujuk pada fakta-fakta konkret yang dapat diamati di dunia nyata. Dalam konteks E-Peken, pendekatan empiris pada program E-Peken yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya mengungkapkan serangkaian temuan yang mendukung dampak positif program tersebut, terutama bagi UMKM. Data empiris menunjukkan bahwa program ini dianggap efektif dalam membantu memudahkan akses masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Hal ini mencerminkan pencapaian tujuan program dalam mendukung keberlanjutan dan kemudahan berbisnis bagi UMKM.

Melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, terlihat bahwa program E-Peken memberikan dampak positif bagi UMKM. Temuan ini didukung oleh testimoni dan pengalaman langsung dari pembeli yang merasakan manfaat nyata dari penggunaan platform tersebut.

Salah satu strategi yang berhasil diidentifikasi melalui pendekatan empiris ini adalah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diwajibkan lkop untuk membeli di E-Peken setiap bulan. Langkah ini dapat dianggap sebagai dorongan signifikan untuk meningkatkan penggunaan platform, menciptakan pasar internal yang stabil.

Pada temuan fakta yang dapat diamati dan diukur langsung, menciptakan dasar kuat untuk mendukung klaim dampak positif dari program E-Peken. Meskipun demikian, evaluasi yang berkelanjutan dan keterlibatan pihak-pihak terkait lainnya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesuksesan dan potensi perbaikan program ini di masa depan.

b) Normatif

Pada pendekatan normatif terhadap manfaat E-Peken di kalangan UMKM, menghasilkan perbedaan persepsi

yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. UMKM yang merasa kurang efektif mungkin memiliki tingkat kesiapan digital yang lebih rendah. Kurangnya pemahaman atau keterampilan dalam menggunakan platform digital bisa menjadi hambatan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada UMKM yang mungkin masih baru dalam mengadopsi teknologi digital.

UMKM yang merasa terbantu mungkin lebih terbiasa dengan teknologi dan lebih siap untuk mengadopsi solusi digital. Ini dapat dipengaruhi oleh seberapa sering mereka menggunakan teknologi dalam operasional sehari-hari dan sejauh mana mereka memahami manfaatnya.

Beberapa UMKM mungkin lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi, sementara yang lain mungkin mengalami kesulitan dan mengadaptasi model bisnis mereka. Menerima perubahan dan mengakui nilai inovasi dapat mempengaruhi cara UMKM berinteraksi dengan solusi digital seperti E-Peken.

Tingkat dukungan dan pendampingan dari pemerintah atau pihak terkait seperti Dinkopdag, dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan manfaat penggunaan E-Peken. Pelatihan, bimbingan, dan bantuan teknik adalah faktor yang dapat membantu UMKM mengatasi hambatan dan memaksimalkan manfaat platform digital.

Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini akan membantu pemerintah dan pihak terkait untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mendukung UMKM dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital seperti E-Peken. Melalui pendekatan normatif, dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan yang

diperlukan untuk meningkatkan manfaat E-Peken bagi seluruh komunitas UMKM.

c) Evaluatif

Evaluatif adalah suatu metode atau pendekatan yang memberikan panduan atau norma tentang apa yang seharusnya dilakukan atau bagaimana sesuatu seharusnya berjalan, berdasarkan pada nilai-nilai, etika, atau prinsip-prinsip tertentu. Pendekatan evaluatif dalam konteks E-Peken penting untuk memastikan bahwa program tersebut dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang diakui dalam masyarakat. Ini juga membantu menciptakan lingkungan *e-commerce* yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Dinkopdag memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, bimbingan, dan sosialisasi terkait penggunaan E-Peken. Dalam prosesnya, mereka juga mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM, dengan fokus pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas mereka. Pentingnya pendampingan ini membantu pelaku UMKM untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi dan memahami manfaatnya.

Sebagai kebijakan evaluatif, seluruh omset yang dihasilkan oleh pelaku UMKM melalui E-Peken sepenuhnya menjadi milik mereka. Hal ini mencerminkan pendekatan inklusif dan memberdayakan pelaku UMKM untuk memiliki dan mengelola hasil usaha mereka sendiri.

Meskipun E-Peken telah memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal, ada beberapa kendala yang masih dihadapi. Salah satu diantaranya adalah keterbatasan kerjasama dengan penyedia layanan pengiriman tertentu. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya perlu terus-menerus berupaya mengatasi berbagai celah dan meningkatkan keberlanjutan serta efektivitas program ini. Upaya terus-

menerus ini termasuk dalam rangka menjaga relevansi aplikasi, meningkatkan integrasi dengan layanan logistik, dan membersihkan solusi bagi kendala-kendala yang mungkin muncul seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, Pemkot Surabaya dapat terus mengoptimalkan kontribusinya terhadap perkembangan dan kesejahteraan UMKM serta perekonomian lokal secara keseluruhan.

2. Faktor Penghambat Efektivitas Penggunaan E-Peken

Meskipun E-Peken memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Kota Surabaya, beberapa faktor penghambat mungkin mempengaruhi efektivitas dan adopsi aplikasi ini. Berikut adalah beberapa faktor penghambat yang mungkin dihadapi E-Peken:

a) Kesiapan Digital Rendah

Beberapa pelaku UMKM mungkin memiliki tingkat kesiapan digital yang rendah, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk menghadapi dan memanfaatkan sepenuhnya E-Peken. Kurangnya pemahaman tentang teknologi digital dan ketidaknyamanan dalam menggunakannya dapat menjadi hambatan.

b) Tingginya Tingkat Persaingan

Dalam lingkungan bisnis online, tingkat persaingan yang tinggi dapat membuat sulit bagi beberapa UMKM untuk mencapai eksposur yang cukup dan menarik pelanggan. Ini dapat mempengaruhi efektivitas pemasaran online melalui E-Peken.

c) Keterbatasan Kerjasama dengan Pihak Terkait

Jika terdapat keterbatasan kerjasama dengan penyedia layanan pengiriman atau lembaga keuangan, pelaku UMKM dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan operasional

mereka secara menyeluruh melalui E-Peken.

d) Resistensi terhadap Perubahan

Beberapa pelaku UMKM mungkin mengalami resistensi terhadap perubahan, terutama jika mereka telah mengoperasikan bisnis mereka dengan cara yang sama selama bertahun-tahun. Resistensi terhadap teknologi baru dapat menjadi hambatan signifikan.

Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini memungkinkan pemerintah dan pengembang aplikasi untuk mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan, termasuk perubahan desain, peningkatan infrastruktur, dan upaya peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis kinerja program E-Peken terhadap UMKM dapat diukur melalui jumlah pendaftaran UMKM dan peningkatan pembelian yang tercatat. Keberhasilan program dinilai berdasarkan pencapaian tujuan dan kelancaran implementasinya. Dengan demikian, kesimpulan dari seluruh konsep evaluasi dapat dirangkum sebagai berikut:

a) Empiris

Program E-Peken sudah efektif dalam memberdayakan UMKM dalam membantu mereka untuk meningkatkan pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian, fakta yang ada mengenai dukungan dari setiap Kelurahan dan ASN menjadi indikator kuat akan pendekatan empiris program ini. Pendekatan empiris menunjukkan bahwa upaya sosialisasi telah mencapai tujuan dalam memberikan pemahaman dan dukungan kepada UMKM.

b) Normatif

Program E-Peken ini manfaatnya sudah dirasakan UMKM, UMKM yang terbuka terhadap perubahan lebih

merasakan manfaat penuh dari solusi digital yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tingkat dukungan dan pendampingan dari pemerintah memberikan bantuan UMKM dalam mengatasi hambatan dan mengoptimalkan platform digital. Untuk UMKM yang kurang efektif, dapat membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan partisipasi mereka.

c) Evaluatif

Berdasarkan fakta yang ditemui dari adanya E-Peken, Dinkopdag serta Aparatur Sipil Negara (ASN) telah berperan sentral dalam memberikan dukungan melalui pelatihan, bimbingan dan sosialisasi terkait E-Peken. Serta fokus pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam membantu mengoptimalkan penggunaan. Dengan memperkuat aspek-aspek tersebut, Pemkot Surabaya dapat memastikan bahwa E-Peken terus berkontribusi secara positif terhadap perkembangan UMKM dan perekonomian lokal serta menjaga relevansinya dalam era yang terus berubah.

2. Rekomendasi

Meskipun aspek perencanaan dan pelaksanaan telah dijalankan dengan baik, tidak dapat diabaikan bahwa kemungkinan terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran terkait pelaksanaan kebijakan penggunaan E-Peken di Kelurahan Kedungdoro, Kota Surabaya. Dengan harapan program ini dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

a) Bagi Dinas atau Pihak Terkait

1) Melanjutkan dan memperluas program pelatihan dan dukungan teknis bagi pelaku UMKM, sediakan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa mereka dapat mengoptimalkan penggunaan E-Peken.

- 2) Mendorong kolaborasi dengan pihak terkait seperti penyedia layanan pengiriman agar menjalin kemitraan yang kuat dan dapat membantu mengatasi kendala yang mungkin dihadapi oleh pelaku UMKM.
 - 3) Menyelenggarakan program insentif seperti komisi rendah atau promosi khusus untuk UMKM yang menggunakan E-Peken secara aktif, ini dapat menjadi pendorong tambahan untuk aplikasi.
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap implementasi E-Peken. Menganalisis data penggunaan, umpan balik, dan tantangan yang dihadapi dapat membantu merancang perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.
- b) Bagi Pelaku UMKM
- 1) Aktif mengikuti pelatihan dan pendidikan lanjutan yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Ini akan membantu meningkatkan keterampilan dan pemahaman dalam menggunakan E-Peken.
 - 2) Mempelajari dan mengoptimalkan fitur-fitur yang disediakan E-Peken, serta memahami cara terbaik untuk memanfaatkan aplikasi ini agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan bisnis.
 - 3) Mengikuti tren pasar dan mengadaptasi produk atau layanan sesuai dengan perubahan permintaan konsumen. Ini dapat membantu UMKM untuk tetap relevan dan bersaing secara efektif.
- Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan hubungan antara instansi dan UMKM melalui E-Peken dapat lebih sinergis dan mendukung pertumbuhan ekosistem UMKM di Kota Surabaya.

REFERENSI

Agustina, T. S., & Suwardianto, R. A. (2023). Antecedent Perilaku Beralih Pelaku UKM Pengguna Infrastruktur Pemasaran

Digital. *Journal of Infrastructure Policy and Management*, 6(2), 129–139.

Akbhari, I., & Prathama, A. (2023). Inovasi Aplikasi E-Peken: Optimalisasi Potensi UMKM Kota Surabaya. *Neo Respublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 396–409.

Asmaira, Munthe, M. Y. R., & Siregar. (2023). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi (JEBMAK)*, 2(3), 162–175.

Brianita, O., Dindaputri, Z. N., & Harmawan, B. N. (2023). Sosialisasi Aplikasi E-Peken Sebagai Sarana Penjualan Online UMKM Kelurahan Semolowaru Kota Surabaya. *Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(3), 16–30.

Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 6(1), 83–94.

Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis dan Implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9.

Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127–135.

Illahi, D. (2022). Pelatihan Digital Marketing Guna Meningkatkan Pangsa Pasar Pada UMKM Kedungdoro Kota Surabaya. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 1(2), 55–66.

Isna, M., & Dwijayanti, B. P. (2023). Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Keputran Kejambon II Melalui Web E-PEKEN Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 287–294.

Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 12(1), 137–145.

- Nauval, M., Prabowo, D., & Gamaputra, G. (2023). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Aplikasi E-Peken Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi*, 1(2), 137–150.
- Safitri, U., Nuarizal, A., & Gistituati, N. (2021). Urgensi Analisis Kebijakan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 6(1), 72–76.
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189.
- Sulistiani, K., & Kaslam, K. (2020). Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Vox Populi*, 3(1), 31–52.
- Wenny, C. D., Fajriana, I., & Wijaya, T. (2022). Pelatihan Basic Online Marketing bagi Pelaku UMKM di Kota Palembang. *Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PADIMAS)*, 1(2), 85–89.